

**Press Release Catatan Akhir Tahun**

## Ini dia 5 Kepala Daerah dengan Penghasilan tertinggi di Tahun 2012

Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tingkat propinsi, kabupaten, kota, dan kabupaten adalah pejabat negara yang besaran gaji, serta tunjangan sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain gaji pokok dan tunjangan, mereka juga mendapatkan insentif dari jumlah pajak serta retribusi daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut adalah rincian komponen penghasilan serta jumlah yang mereka dapatkan :

Komponen Penghasilan	Gubernur	Wakil Gubernur	Walikota/ Bupati	Wakil Walikota/ Bupati	dasar hukum
Gaji Pokok	Rp3.000.000	Rp 2.400.000	Rp 2.100.000	Rp 1.800.000	Pasal 4 PP. No. 59 Tahun 2000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.400.000	Rp 4.320.000	Rp 3.780.000	Rp 3.240.000	Pasal 1 ayat (2) Keppres No 68 tahun 2001
Tunjangan Operasional	Besarnya biaya <b>penunjang operasional</b> Gubernur dan wakilnya ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt; Rp 15 milyar, min: Rp. 150 juta, max: 1,75%;</li> <li>• &gt; Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 262,5 juta, max: 1%</li> <li>• &gt; Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar min: Rp. 500 juta; max: 0,75%;</li> <li>• &gt; Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar, min: Rp. 750 juta, max: 0,40%;</li> <li>• &gt;Rp 250 milyar s/d Rp. 500 milyar, min: Rp. 1 milyar, max: 0,25%;</li> <li>• &gt; Rp. 500 milyar, min: Rp. 1,25 milyar, max: 0.15%.</li> </ul>		Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;math&gt;\leq&lt;/math&gt; Rp 5 milyar, min: Rp. 125 juta, max: 3%</li> <li>• &gt; Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar, min: Rp. 150 juta, max: 2%;</li> <li>• &gt;Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar, min: Rp. 200 juta, max: 1,50%;</li> <li>• &gt; Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar, min: Rp. 300 juta, max: 0,80%;</li> <li>• &gt; Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar, min: Rp. 400 juta, max: 0,40%;</li> <li>• &gt; Rp 150 milyar, min: Rp. 600 juta, max: 0,15%.</li> </ul>		Pasal 9 ayat (1) dan (2) PP No. 109 tahun 2000
Insentif Pajak dan Retribusi	Besarnya pembayaran Insentif setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; Rp 1 Triliun rupiah = paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat</li> <li>• antara Rp 1 Triliun s/d Rp 2,5 Triliun = 7 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat</li> <li>• antara Rp 2,5 Triliun s/d Rp 7,5 Triliun = 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat</li> <li>• &gt; Rp 7,5 Triliun = 10 kali gaji dan tunjangan yang melekat</li> </ul>				Pasal 7 PP No. 69 tahun 2010

Setiap kepala daerah juga mendapatkan fasilitas rumah dinas. Tetapi tidak hanya itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2000, kepala daerah juga mendapatkan tunjangan biaya-biaya berikut :

- a. Biaya rumah tangga
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas
- e. Biaya pemeliharaan kesehatan
- f. Biaya perjalanan dinas
- g. Biaya pakaian dinas
- h. Biaya penunjang operasional

Untuk wilayah propinsi, Gubernur Jawa Timur memperoleh penghasilan tertinggi di antara gubernur-gubernur lainnya. Setiap bulan, Gubernur Jawa Timur diperkirakan memperoleh penghasilan sebesar Rp 642.360.003 yang terdiri dari gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000, tunjangan jabatan sebesar Rp 5.400.000, tunjangan operasional Rp 566.760.000, dan insentif pemungutan pajak dan retribusi sebesar Rp 67.200.000. besarnya insentif yang diperoleh oleh gubernur Jawa Timur dikarenakan pajak dan retribusi yang diperoleh pada tahun 2012 sebesar Rp 7,3 Triliyun. Sehingga, gubernur Jawa Timur mendapatkan insentif 8 kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Selain itu, besarnya tunjangan operasional yang diperoleh dikarenakan PAD tahun 2012 lebih dari Rp 500 Milyar, sehingga dia mendapatkan tunjangan operasional sebesar 0,15% dari PADnya. Dengan demikian, dalam satu tahun 2012 ini, Gubernur Jawa Timur memperoleh penghasilan sebesar Rp 7,7 Milyar.

Untuk wilayah perkotaan, Walikota Surabaya berada di peringkat teratas dalam menerima penghasilan setiap bulannya, yaitu kira-kira sebesar Rp 194,1 juta. Penghasilan tersebut terdiri dari gaji pokok Rp 2.100.000, tunjangan jabatan Rp 3.240.000, tunjangan operasional Rp 147 juta, dan insentif pajak dan retribusi Rp 41,1 juta. Dengan demikian, dalam satu tahun anggaran 2012 ini, walikota surabaya dapat memperoleh penghasilan sebesar Rp 2,3 Milyar.

Sementara untuk wilayah kabupaten, Kab. Badung adalah daerah dengan penghasilan bupati tertinggi seindonesia. Dalam setiap bulan di tahun 2012, diperkirakan Bupati Badung memperoleh penghasilan sebesar Rp 129,6 juta dengan rincian sebagai berikut; gaji pokok Rp 2.100.000, tunjangan jabatan Rp 3.780.000, tunjangan operasional Rp 82,6 juta, dan insentif pemungutan pajak dan retribusi Rp 41,1 juta. Artinya, dalam satu tahun ini Bupati Badung diperkirakan menerima penghasilan sebesar Rp 1,5 Milyar.

Berikut ini adalah daftar lima Gubernur, Walikota, Bupati dan wakilnya yang mendapatkan penghasilan tertinggi setiap bulannya berdasarkan hasil analisis dan simulasi Seknas FITRA.

**5 Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penghasilan tertinggi**

No	Propinsi	Total Penghasilan/ bulan		Total Penghasilan/ Tahun	
		Gubernur	Wakil Gubernur	Gubernur	Wakil Gubernur
1	Prov. Jawa Timur	Rp 642.360.003	Rp 627.240.003	Rp 7.708.320.036	Rp 7.526.880.036
2	Prov. Jawa Barat	Rp 603.422.043	Rp 584.942.043	Rp 7.241.064.521	Rp 7.019.304.521
3	Prov. Jawa Tengah	Rp 438.097.208	Rp 422.977.208	Rp 5.257.166.498	Rp 5.075.726.498
4	Prov. Kalimantan Timur	Rp 344.087.750	Rp 328.967.750	Rp 4.129.053.000	Rp 3.947.613.000
5	Prov. Sumatera Utara	Rp 327.251.701	Rp 312.131.701	Rp 3.927.020.411	Rp 3.745.580.411

**5 Walikota dan Wakil Walikota dengan penghasilan tertinggi**

No	Kota	Total Penghasilan/ bulan		Total Penghasilan/ Tahun	
		Walikota	Wakil Walikota	Walikota	Wakil Walikota
1	Kota Surabaya	Rp 194.122.808	Rp 187.402.808	Rp 2.329.473.690	Rp 2.248.833.690
2	Kota Medan	Rp 129.674.323	Rp 123.794.323	Rp 1.556.091.880	Rp 1.485.531.880
3	Kota Badung	Rp 88.376.201	Rp 82.496.201	Rp 1.060.514.413	Rp 989.954.413
4	Kota Semarang	Rp 82.433.272	Rp 76.553.272	Rp 989.199.269	Rp 918.639.269
5	Kota Bekasi	Rp 76.028.893	Rp 70.148.893	Rp 912.346.712	Rp 841.786.712

**5 Bupati dan Wakil Bupati dengan penghasilan tertinggi**

No	Kabupaten	Total Penghasilan/ bulan		Total Penghasilan / Tahun	
		Bupati	Wakil Bupati	Bupati	Wakil Bupati
1	Kab. Badung	Rp 129.596.905	Rp 122.876.905	Rp 1.555.162.858	Rp 1.474.522.858
2	Kab. Bogor	Rp 90.730.071	Rp 84.850.071	Rp 1.088.760.849	Rp 1.018.200.849
3	Kab. Sidoarjo	Rp 78.519.751	Rp 72.639.751	Rp 942.237.018	Rp 871.677.018
4	Kab. Tangerang	Rp 72.639.468	Rp 66.759.468	Rp 871.673.616	Rp 801.113.616
5	Kab. Bekasi	Rp 71.928.453	Rp 66.048.453	Rp 863.141.431	Rp 792.581.431

Yang harus masyarakat ketahui adalah bahwa *setiap satu rupiah yang dinikmati sebagai penghasilan kepala daerah bersumber dari pajak dan retribusi* yang bayar rakyat. Oleh karenanya, setiap kepala daerah harus mengabdikan kepada rakyat dengan menjalankan roda pemerintahan sebagai media untuk melayani masyarakat. Program pembangunan harus diorientasikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Bukan untuk kesejahteraan para birokrat dan antek-antek kelompoknya, atau untuk kesenangan dan kepentingan pribadinya.

**Maulana**

Koord. Riset Seknas FITRA

081382828670

maulana@seknasfitra.org